STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN FASLITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI *WEBSITE* *e - LEGAL DRAFTING*

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR
2023

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50 – 52 Kota Surabaya
Telepon (031) 5340707, Fax. (031) 5345496

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG HUKUM
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR SOP	:	W15 - OT.02.02 - 84
TGL. PEMBUATAN	:	26 Juni 2023
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	26 Juni 2023
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik oleh : Drs. Imam Jauhari, M.H. NIP 196308231992031001
NAMA SOP	:	*e - LEGAL DRAFTING*

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dan Pembinaannya.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.05.01 TAHUN 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 TAHUN 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
8. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor W15 – 9. PP.04.02 TAHUN 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Layanan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Melalui Website e-Legal Drafting Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki Sertifikat Lulus Diklat JF Perancang Peraturan Perundang-undangan dan/atau dapat melalui *Inpassing*.
2. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
3. Mengetahui Tugas, Pokok, dan Fungsi Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
4. Mengetahui Tugas, Pokok, dan Fungsi Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Mengetahui Mekanisme Penyusunan Pembuatan Laporan.

KETERKAITAN:

1. SOP Nomor: W15 - OT.02.02 – 80 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
2. SOP Nomor: W15 - OT.02.02 – 81 tentang Fasilitasi Penyusunan / Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. SOP Nomor: W15 - OT.02.02 – 82 tentang Kajian Produk Hukum Daerah
4. SOP Nomor: W15 - OT.02.02 – 83 tentang Mediasi dan Konsultasi Perancangan Peraturan Daerah

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Komputer / Laptop / Printer / *Scanner*
2. Jaringan Internet
3. LCD Proyektor
4. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)

PERINGATAN:

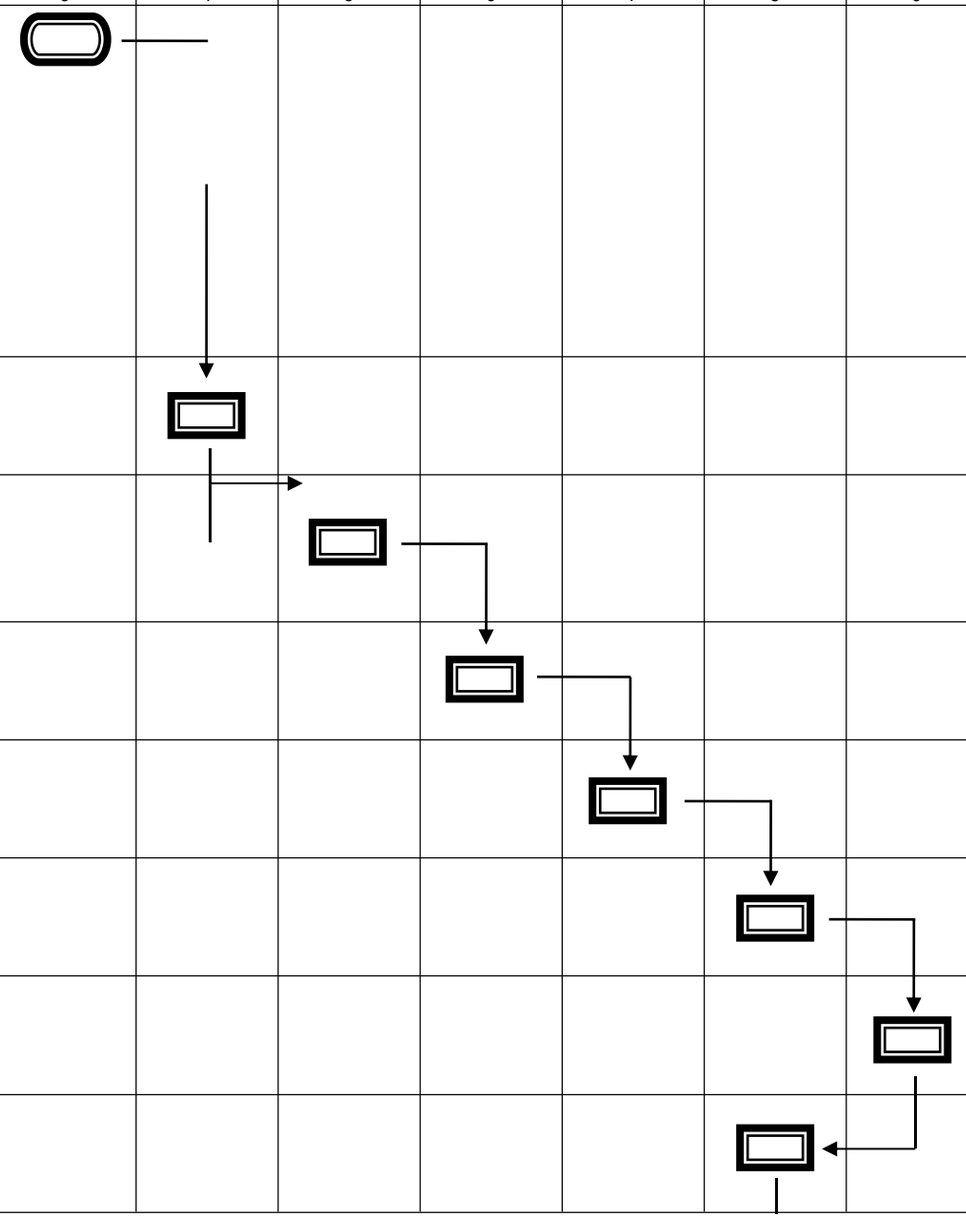
Nihil

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Disimpan Sebagai Data Manual; dan
2. *Electronic*

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No.	Kegiatan	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.
		Sistem *e-Legal Drafting*	Admin	Kakanwil	Kadiv	Kabid Hukum	Kasubbid FP2HD	Perancang PPUU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pemohon (Pemerintah Daerah dan/atau DPRD) mengajukan Permohonan sesuai dengan jenis Layanan yang dibutuhkan melalui *Website:* *https://www.e-legaldraftingjatim.kemenkumham.go.id.*								*File Softcopy* Berkas Permohonan	5 Menit	--	Jenis Layanan: 1. Harmonisasi; 2. Fasilitasi Penyusunan/ Pembentukan PHD; 3. Fasilitasi/Evaluasi RPHD; 4. Kajian Produk Hukum Daerah; 5. Mediasi dan Konsultasi Perancangan Perda; dan 6. Harmonisasi dan Sinkronisasi.
2.	Admin menerima Permohonan melalui *Website e-Legal Drafting* dan menyampaikan Surat Permohonan kepada Kakanwil melalui Sisumaker								*File Softcopy* Berkas Permohonan	5 Menit	--	--
3.	Menerima Permohonan dan merintahkan kepada Kadiv Yankum dan HAM untuk menindaklanjuti Layanan sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan.								*File Softcopy* Berkas Permohonan	--	Disposisi	--
4.	Memerintahkan kepada Kabid Hukum untuk menindaklanjuti Layanan sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan.								*File Softcopy* Berkas Permohonan	--	Disposisi	--
5.	Merintahkan kepada Kasubbid FP2HD untuk menindaklanjuti Layanan sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan.								*File Softcopy* Berkas Permohonan	--	Disposisi	--
6.	Merintahkan kepada Perancang PPUU untuk menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan.								*File Softcopy* Berkas Permohonan	--	Disposisi	--
7.	Melaksanakan rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan dan melaporakan hasil rapat-rapat kepada Kasubbid FP2HD.								*File Softcopy* Berkas Permohonan	--	Konsep Laporan	Tim Pokja dan/atau Tim Zonasi
8.	Melaporkan hasil rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan kepada Kabid Hukum.								Konsep Laporan	--	Konsep Laporan	--



9.	Melaporkan hasil rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan kepada Kadiv Yankum dan HAM.								Konsep Laporan	--	Konsep Laporan	--
10.	Melaporkan hasil rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan kepada Kakanwil.								Konsep Laporan	--	Konsep Laporan	--
11.	Menerima laporan hasil rapat-rapat sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan dan memerintahkan kepada Admin untuk menyampaikan hasil layanan sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan kepada Pemohon melalui *Website e-Legal Drafting*								Laporan	--	Produk FP2HD	--
12.	Admin menyampaikan hasil layanan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan melalui *Website e-Legal Drafting*								Produk FP2HD	5 Menit	Produk FP2HD	Sesuai dengan Jenis Layanan
13.	Pemohon (Pemerintah Daerah/DPRD) menerima hasil layanan sesuai dengan Jenis Layanan yang dibutuhkan melalui *Website:* *https://www.e-legaldraftingjatim.kemenkumham.go.id*								Produk FP2HD	5 Menit	Produk FP2HD	Sesuai dengan Jenis Layanan

Keterangan Simbol:

1. Simbol Kapsul/***Terminator*** , untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir.
2. Simbol Kotak/***Process*** , untuk mendeskripsikan proses berjalannya suatu prosedur atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/***Decision*** , untuk mendeskripsikankegiatan pengambilan keputusan “ya” atau “tidak”.
4. Simbol Anak Panah/Panah/***Arrow*** , untuk mendeskrpsikanarah kegiatan (arah proses kegiatan).
5. Simbol Segilima/***Off-Page Connector*** , untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol untuk pindah halaman.